GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**06 November 2007**
Subyek	**:**	**Kehutanan**	**Hari**	**:**	**Selasa**
			Halaman	**:**	**06**

Penurunan Emisi dan HTI Harus Sinergis

Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengatakan adanya komitmen dunia terhadap penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reduced Emision from Deforestation and Forest Degradation* / REDD) jangan sampai kontra produktif dengan dengan proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakya (HTR).

Kekhawatiran Kaban didasari pada kenyataan, hutan di Indonesia juga merupakan aset nasional yang menjadi salah satu sumber pendapatan nasional. Pemerintah daerah yang memiliki lahan hutan tentu ingin memanfaatkan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan warganya. Pembukaan hutan alami musti dilakukan untuk diubah menjadi hutan tanaman industri yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Karena itu, melalui UU Tata Ruang Nasional, Dephut berupaya menjembatani segala kepentingan daerah dan kepentingan nasional terkait isu internasional mengenai perubahan iklim.

"HTI dan HTR merupakan merupakan kepentingan strategis nasional, karenanya kami ingin adanya definisi yang sama terhadap isu ini pada UNFCCC di Bali nanti," ujar MS Kaban dalam Lokakarya Nasional tentang REDD di Manggala Wanabakti Jakarta kemarin (15/11).

Pasalnya sembilan juta hektare lahan HTI dan HTR berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Diantaranya menyokong dan menghidupi 81 perusahaan *pulp and paper* nasional dengan aset dan uang yang bergerak mencapai US$25 miliar.

Kekhawatiran MS Kaban tersebut dibantah Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Emil Salim. Mantan Menteri Lingkungan Hidup tersebut, mengatakan HTI bisa sejalan dengan misi perlindungan hutan dalam pandangan Protokol Kyoto. "Yang dibicarakan dalam perdagangan karbon nanti itu menyangkut luas hutannya, hutan HTI dan HTR yang belum ditebang bisa juga bermanfaat dan berkontribusi positif," ujar Emil Salim.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

MS Kaban lantas menyebut, saat ini tinggal bagaimana menciptakan definisi yang sama antara negara berkembang dan negara-negara maju dalam hal kompensasi bagi pemeliharaan hutan. "Terserah pada pengusaha HTI dan HTR, apabila mau melindungi hutannya untuk 10, 20 tahun. Apabila lebih menguntungkan kenapa tidak, baru setelah itu hutannya dapat dimanfaatkan," ujar Menhut.

Selain itu *The Indonesian Forest Climate Alliance* (IFCA), badan yang dibentuk pemerintah RI untuk menyongsong pelaksanaan REDD sedang menggodok kalusul tentang mekanisme perdagangan dan kompensasi antara negara maju dengan negara yang mempunyai hutan. "Isinya kami harus adakan penghematan hutan, dengan pengelolaan hutan secara sinergis antara pusat dan daerah," ujar Menhut lagi.

Karena itulah keberadaan Badan Koordinasai Tata Ruang Nasional (BKTRN) dinilai strategis. Saat ini, setiap kebijakan pembangunan tata ruang di daerah harus melalui sepengatahuan dan persetujuan BKTRN. "Kendalanya dalam hal teknis operasional kami terkadang berbenturan dengan kebijakan Pemda. Dephut dapat aktif menyuarakan kepentingan hutan nasional," kata Kaban.

Wahyudi Wardjo, Kepala Badan Litbang Dephut menambahkan insentif negara maju kepada Indonesia nantinya akan menyentuh terutama untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Pemda juga akan mendapatkan bagian karena sebagai pengawas. Sementara pusat akan menyisihkan sebagian dana kompensasi tersebut untuk antisipasi terhadap tuntutan terhadap kebocoran proyek yang melenceng dari komitmen nasional.

Indonesia bisa mendapat kompensasi US$2 miliar per tahun dari adanya hutan di Tanah Air yang juga menyumbang oksigen kepada dunia. Tentu saja ini masih harus diperjuangkan dalam forum UNFCCC di Bali nanti.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP